

**PENGARUH DEWAN KOMISARIS TERHADAP
ENVIRONMENTAL DISCLOSURE**

*(Studi Empiris Pada Perusahaan Go Public yang Masuk Peringkat
Corporate Governance Perception Index Tahun 2008-2012)*



NASKAH PUBLIKASI

Disusun Oleh:

MAREM

B200110139

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015**

PENGESAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini telah membaca Naskah Publikasi dengan judul:
**PENGARUH DEWAN KOMISARIS TERHADAP ENVIRONMENTAL
DISCLOSURE (Studi Empiris Pada Perusahaan Go Public yang Masuk
Peringkat Corporate Governance Perception Index Tahun 2008-2012)**

Yang ditulis oleh:

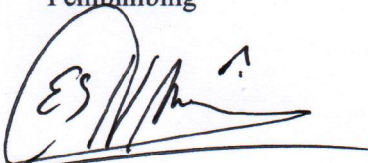
MAREM

B 200 110 139

Penandatanganan berpendapat bahwa Usulan Penelitian tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, 5 November 2015

Pembimbing



(Drs. Eko Sugiyanto, M.Si)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, SE, M.Si)

**PENGARUH DEWAN KOMISARIS TERHADAP
*ENVIRONMENTAL DISCLOSURE (Studi Empiris Pada
Perusahaan Go Public yang Masuk Peringkat Corporate
Governance Perception Index Tahun 2008-2012)***

Marem

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

andryco90@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini menguji pengaruh dewan komisaris yang diproksikan dengan ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan presiden komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris terhadap *environmental disclosure* yang diukur dengan skor pengungkapan lingkungan pada *annual report* dengan indeks GRI. Penelitian ini juga menggunakan *leverage*, *profitabilitas* dan *size* sebagai variabel kontrol.

Penelitian ini menggunakan sampel 59 perusahaan, dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2012 yang masuk dalam peringkat *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* dan *Indonesian Capital market Directory (ICMD)* tahun 2008-2012, serta mengeluarkan laporan keuangan tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh yang negatif signifikan terhadap *environmental disclosure* (2) proporsi dewan komisaris independen mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap *environmental disclosure* (3) latar belakang pendidikan presiden komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure* (4) dan jumlah rapat dewan komisaris mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap *environmental disclosure*.

Kata Kunci: ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan presiden komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, *environmental disclosure*.

1. PENDAHULUAN

Kepedulian pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia telah menyebabkan organisasi atau perusahaan lebih memperhatikan potensi dampak lingkungan yang ada akibat aktivitas, produk dan jasa yang mereka miliki. Kinerja perusahaan dalam bidang lingkungan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pihak internal dan eksternal yang berkepentingan terhadap perusahaan.

Oleh karena semakin tingginya tuntutan masyarakat, maka beberapa perusahaan industri terutama yang rawan lingkungan (industri yang berdampak atau berpengaruh penting terhadap lingkungan, sehingga industri ini sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor lingkungan hidup). Perusahaan telah mencoba membuat kebijakan menyangkut akuntabilitas perusahaan terhadap *stakeholder*, khususnya masyarakat dan lingkungan hidup. Salah satu cara perusahaan menunjukkan akuntabilitas kepada *stakeholdernya* itu dengan memanfaatkan laporan tahunan perusahaan sebagai media untuk mengungkapkan aktivitas lingkungannya.

Saat ini keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya dilihat dari tingkat laba yang didapatkan oleh perusahaan tersebut, namun juga dari tanggungjawab atas aktivitas yang dilakukan perusahaan baik dalam bidang sosial, kesehatan maupun lingkungan. Pentingnya aktivitas dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga mendapatkan perhatian dari pemerintah, hal tersebut dapat dilihat dari Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan tentang pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (pertanggungjawaban sosial perusahaan) bagi Perseroan Terbatas. UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 dan 74, pada pasal 66 ayat 2 bagian c tertulis bahwa selain laporan keuangan, dalam laporan tahunan perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan. Dalam pasal 74 menyatakan bahwa setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan.

Menurut Suratno *et al* (2006) dalam Effendi *et al* (2012) *Environmental Disclosure* merupakan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan. Menurut (Wilmshurst dan Frost, 2000, dalam Fatayaningrum, 2011), *Environmental Disclosure* adalah pengungkapan perusahaan terhadap dampak dari aktivitas perusahaan pada lingkungan fisik atau alam, di mana perusahaan tersebut beroperasi. Lebih lanjut menurut (Suratno, dkk, 2006), *Environmental Disclosure* merupakan pengungkapan informasi terkait dengan lingkungan di dalam laporan tahunan (*Annual Report*) perusahaan. Untuk pengukuran *Environmental Disclosure* dapat dilihat pada pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) di laporan tahunan perusahaan maupun laporan keberlanjutan (*sustainability report*) secara terpisah. Sedangkan (Brown dan Deegan, 1998, dalam Effendi *et al*, 2012) mengatakan *Environmental Disclosure* penting untuk dilakukan karena melalui pengungkapan lingkungan hidup pada laporan tahunan perusahaan, masyarakat dapat memantau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi tanggungjawab sosialnya. Dengan cara demikian, perusahaan akan memperoleh manfaat positif yakni perhatian, kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.

Pada beberapa tahun terakhir ini, Indonesia mengalami peningkatan permasalahan pencemaran lingkungan hidup (Suratno, Darsono, dan Mutmainah, 2006, dalam Effendi *et al*, 2012). Pencemaran lingkungan hidup ini dapat dilihat dari berbagai bencana yang terjadi akhir-akhir ini, seperti banjir bandang di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tanah longsor di Desa Sijeruk Jawa Tengah dan daerah lainnya di Jawa dan Sumatera, serta kebakaran hutan di beberapa hutan lindung Kalimantan. Bahkan munculnya banjir lumpur bercampur gas sulfur di daerah Sidoarjo Jawa Timur merupakan bukti rendahnya perhatian perusahaan terhadap dampak lingkungan hidup (Ja'far, 2006).

Permasalahan lingkungan hidup menjadi perhatian yang serius, baik oleh konsumen, investor, maupun pemerintah. Pada umumnya, para investor lebih tertarik pada perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan hidup yang baik dan tidak mengabaikan masalah pencemaran lingkungan (Ja'far, 2006).

Kepentingan bisnis yang menunjukkan reputasi, kredibilitas, dan *value added* bagi perusahaan di mata *stakeholder* menjadi dorongan perusahaan untuk mengungkapkan tanggungjawab sosialnya terhadap lingkungan hidup di *Annual Report* (Eipstein dan Freedman, 1994, dalam Djoko Suhardjanto, 2010).

Standar akuntansi keuangan di Indonesia belum mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi lingkungan hidup (Suhardjanto, 2008, dalam Djoko Suhardjanto, 2010), akibatnya banyak perusahaan yang tidak mengungkapkan aktivitas lingkungan hidupnya (Anggraini, 2006, dalam Djoko Suhardjanto, 2010). Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) yang baik menjadi salah satu faktor pendorong yang memunculkan akuntansi pertanggungjawaban lingkungan hidup (Eng dan Mak, 2003).

Penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005) berhasil mendukung teori agensi dan sesuai dengan pendapat (Co Uerdan Gregory, 1999 dalam Djoko Suhardjanto *et al*, 2012) yang menyatakan bahwa "semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan *Chief Executive Officer* (CEO) dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif, dikaitkan dengan pengungkapan informasi lingkungan hidup, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya". Hasil ini juga berhasil mendukung hasil penelitian (Arin, 2002, dalam Sembiring, 2005) yang menemukan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela yang dibuat perusahaan di Indonesia. Dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mempengaruhi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer, artinya semakin kompeten dewan komisaris maka semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan maupun pengungkapan lingkungan perusahaan (Cho, C. H. & Pattern, D. M., 2007).

Proporsi komisaris independen atas jumlah seluruh anggota dewan komisaris merupakan variabel yang sering digunakan untuk menguji pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Environmental Disclosure*. Penelitian (Chen dan Jaggi, 1998, dalam Djoko Suhardjanto, 2010) menunjukkan terdapat hubungan

positif antara proporsi komisaris independen atas jumlah seluruh anggota dewan komisaris dan *Environmental Disclosure*.

Karakteristik personal komisaris utama juga mempengaruhi *Environmental Disclosure*. Hal ini dijelaskan oleh penelitian (Haniffa dan Cooke, 2005), yang menunjukkan adanya hubungan antara pengungkapan informasi lingkungan dengan faktor dominan komisaris utama pribumi yang menduduki jabatan tersebut. Latar belakang pendidikan komisaris utama yang mempunyai pendidikan bisnis (keuangan) juga menjadi variabel penentu. Komisaris utama yang mempunyai latar belakang pendidikan bisnis biasanya berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki, meskipun bukan menjadi suatu keharusan bagi pelaku usaha untuk punya pendidikan bisnis namun akan lebih baik jika anggota dewan komisaris memiliki latar belakang pendidikan bisnis (Kusumastuti, Supatmi, dan Sastra, 2006).

2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Hubungan Antara Ukuran Dewan Komisaris dengan *Environmental Disclosure*

Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara ukuran dewan komisaris terhadap *Environmental Disclosure*. Hasil penelitian (Frendy *et al*, 2011) dan (Sun *et al*, 2010) menemukan adanya pengaruh positif yang signifikan antara ukuran dewan komisaris dengan *Environmental Disclosure*. Lain halnya dalam penelitian (Febrina *et al*, 2011) dan (Uwuigbe, 2011) yang menemukan pengaruh negatif antara ukuran dewan komisaris dengan *Environmental Disclosure*.

H1 : Ukuran Dewan Komisaris Berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*

2.2 Hubungan Antara Proporsi Dewan Komisaris Independen dengan *Environmental Disclosure*

Peran utama dewan komisaris adalah terkait dengan fungsi kontrol (Pound, 1995). Dewan komisaris independen merupakan alat untuk mengawasi perilaku manajemen untuk meningkatkan pengungkapan informasi sukarela dalam laporan tahunan perusahaan (Rosenstein dan Wyatt, 1990). Lebih jauh lagi (Choiriyah,

2010) dan (Uwuigbe *et al*, 2011) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure*. Lain halnya dengan hasil penelitian (Suhardjanto dan Miranti, 2008), (Suhardjanto dan Afni, 2009), (Yusnita, 2010) dan (Fatayaningrum, 2011) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap *Environmental Disclosure*.

H2 : Proporsi Dewan Komisaris Independen Berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*

2.3 Hubungan Antara Latar Belakang Pendidikan Presiden Komisaris dengan *Environmental Disclosure*

Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh presiden komisaris berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki (Ahmed and Nicholls, 1994 dalam Akhtaruddin, 2009). Akan lebih baik jika seorang presiden komisaris memiliki latar belakang pendidikan bisnis dan ekonomi, karena seorang presiden komisaris harus memiliki kemampuan untuk mengelola bisnis dan mengambil keputusan bisnis (Bray, Howard, dan Golan, 1995 dalam Kusumastuti dkk, 2007). Lebih jauh lagi (Suhardjanto dan Afni, 2009) dan (Choiriyah, 2010) mengatakan latar belakang pendidikan presiden komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap *Environmental Disclosure*. Namun, hasil tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Suhardjanto dan Miranti, 2008) yang mengatakan latar belakang pendidikan presiden komisaris tidak berpengaruh dengan *Environmental Disclosure*.

H3 : Latar Belakang Pendidikan Presiden Komisaris Berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*

2.4 Hubungan Antara Jumlah Rapat Dewan Komisaris dengan *Environmental Disclosure*

Sesuai dengan *Corporate Governance Guidelines* yang ditetapkan 12 September 2007, dewan komisaris harus memiliki skedul atau jadwal rapat tetap dan dapat dilakukan rapat tambahan sesuai dengan kebutuhan serta dilakukan pada saat yang tepat. Hal ini untuk mengetahui apakah operasi perusahaan telah sesuai dengan kebijakan dan strategi perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Brick dan Chidambaran, 2007), menunjukkan bahwa semakin

banyak rapat yang diselenggarakan dewan komisaris akan meningkatkan kinerjanya. Hal tersebut berdampak terhadap peningkatan pengungkapan informasi oleh dewan komisaris terkait dengan pengungkapan lingkungan.

H4 : Jumlah Rapat Dewan Komisaris Berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*

3. METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel independen dalam penelitian ini adalah dewan komisaris yang direpresentasikan oleh ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan presiden komisaris, dan jumlah rapat dewan komisaris. Variabel dependennya adalah *Environmental Disclosure*. Selain itu, *size*, *profitabilitas*, dan *leverage* dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel kontrol.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 145 perusahaan *go public* yang masuk peringkat *Corporate Governance Perception Index* tahun 2008-2012. Berdasarkan teknik *purposive sampling*, diperoleh sebanyak 59 perusahaan.

3.3 Metode Analisis Data

Uji hipotesis dilakukan dengan cara uji signifikansi (pengaruh nyata) variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi digunakan oleh peneliti apabila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, dan apabila dua atau lebih variabel independen sebagai predictor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya. Untuk pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan analisis regresi berganda. Berikut model regresi tersebut:

$$EDlit = \alpha_0 + \alpha_1 UDEKOMit + \alpha_2 PRODKOMit + \alpha_3 LBPPKit + \alpha_4 JRDKit + \alpha_5 SIZEit + \alpha_6 LEVit + \alpha_7 PROFit + Eit$$

Keterangan persamaan regresi berganda

Simbol	Keterangan
EDI	<i>Environmental Disclosure Index</i>
α_0	Konstanta
$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, \alpha_6$	Koefisien
UDEKOM	Ukuran Dewan Komisaris
PRODKOMI	Proporsi Dewan Komisaris Independen
LBPPK	Latar Belakang Pendidikan Presiden Komisaris
JRDK	Jumlah Rapat Dewan Komisaris
SIZE	Ukuran Perusahaan
LEV	<i>Leverage</i> yang diukur dengan rumus DER
PROF	<i>Profitabilitas</i> yang diukur dengan rumus ROA
E	<i>Standar error</i>

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa udekom, prodkomi, lbppk, jrdk memiliki rata-rata relatif sedang. *Size* dan prof juga memiliki rata-rata relatif sedang, tetapi untuk *leverage* sebagai proksi dari rasio kewajiban terhadap modal sendiri atau ekuitas juga memiliki rata-rata relatif tinggi.

Hasil uji normalitas data diketahui bahwa nilai signifikan atau *probability* dari (*asympt. Sig. (2-tailed)*) yaitu sebesar $0.922 > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* > 0.1 , sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi

variabel dependen. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikan > 0.05 , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model.

Berdasarkan hasil uji *durbin* waston pada model regresi nilai DW sebesar 2.144 dimana angka tersebut berada pada $dU < DW < 4-dU$ yaitu $1.7266 < 2.144 < 2.2734$, dapat dikatakan bahwa H_0 = tidak ada autokorelasi positif, negatif tidak ditolak. Yang artinya bahwa dalam model tersebut tidak terdapat autokorelasi. Hasil uji *goodness of fit* model menunjukkan bahwa model dinyatakan fit sebagaimana dapat dilihat dari uji determinasi menunjukkan nilai adjusted R square sebesar 0.233, selain itu hasil pengolahan data terlihat bahwa nilai $F = 3.510$ dengan signifikan sebesar $0.004 < 0.05$. nilai signifikan pengujian yang lebih kecil dari $\alpha = 0.05$ menunjukkan bahwa model regresi dapat dikatakan baik, sehingga dapat dilanjutkan ke pengujian hipotesis.

4.1.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Environmental Disclosure*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang pertama mendapatkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris (UDEKOM) tidak mempunyai pengaruh terhadap *Environmental Disclosure* (EDI). Dibuktikan dengan hasil uji t memperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0.484 < 2.007$) dengan nilai signifikan sebesar 0.630 berada lebih besar pada $\alpha = 5\%$, sehingga **H_1 ditolak**.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Febrina *et al* (2011) dan (Uwuigbe, 2011), yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak mempengaruhi *Environmental Disclosure*. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Frendy *et al*, 2011) dan (Sun *et al*, 2010), yang menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan komisaris dengan *Environmental Disclosure*.

Alasan mengapa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure* karena dewan komisaris tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap *Environmental Disclosure*. Sehingga, berapapun jumlahnya dewan komisaris dalam suatu perusahaan tidak satupun dewan komisaris yang memperhatikan terhadap pengelolaan lingkungan. Artinya, dari sekian banyaknya

perusahaan yang ada disampel, tidak satupun dari mereka yang memfokuskan diri pada *Environmental Disclosure*.

4.1.2 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *Environmental Disclosure*

Dalam penelitian ini, proporsi dewan komisaris independen diukur dari perbandingan antara total komisaris independen dengan total dewan komisaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.468 > 2.007$) dengan nilai signifikan sebesar 0.017 berada lebih kecil pada $\alpha = 5\%$. Sehingga **H₂ diterima**, yang artinya bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *Environmental Disclosure*.

Dengan demikian, keberadaan atau proporsi dewan komisaris independen dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Choiriyah, 2010 dan Uwuigbe, 2011) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure*.

4.1.3 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Presiden Komisaris terhadap *Environmental Disclosure*

Berdasarkan hasil pengujian variabel latar pendidikan presiden komisaris (LBPPK) terhadap tingkat *Environmental Disclosure* (EDI) diperoleh hasil bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0.315 < 2.007$) dengan tingkat signifikan sebesar 0.754 berada lebih besar pada $\alpha = 5\%$, sehingga **H₃ ditolak**. Hal ini dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan presiden komisaris tidak dapat dibuktikan berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian (Haniffa dan Cooke, 2005, Kusumastuti dkk, 2007, Permatasari, 2009) serta (Suhardjanto dan Miranti, 2008) yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan presiden komisaris tidak berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*.

Alasan yang digunakan untuk menjelaskan hal ini adalah dalam penelitian ini hanya mendefinisikan latar belakang pendidikan secara spesifik pada bisnis dan ekonomi (keuangan), padahal terdapat kemungkinan latar belakang pendidikan presiden komisaris sesuai dengan jenis usaha perusahaan yang dapat

menunjang kelangsungan bisnis perusahaan lebih diperlukan. Selain itu, adanya kebutuhan akan *soft skill* dalam menjalankan bisnis, sedangkan pendidikan yang diperoleh di bangku sekolah merupakan pendidikan *hard skill*. Penelitian dari *Harvard University* di Amerika Serikat mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% dengan *hard skill* dan sisanya 80% dengan *soft skill* (Nurudin, 2004).

4.1.4 Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap *Environmental Disclosure*

Berdasarkan hasil pengujian variabel jumlah rapat dewan komisaris terhadap *Environmental Disclosure*, dapat diketahui bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-3.081 < 2.007$) dengan tingkat signifikan sebesar 0.003 berada lebih kecil pada $\alpha = 5\%$, sehingga **H₄ diterima**. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris dapat dibuktikan berpengaruh signifikan terhadap *Environmental Disclosure*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering dewan komisaris melakukan rapat, akan semakin baik pelaksanaan pengungkapan lingkungan perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan (Kharis, 2012) yang menyatakan bahwa rapat dewan komisaris merupakan salah satu ruang yang intensif untuk mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan strategis perusahaan. Rapat dewan komisaris yang dilakukan secara berkala dan berbobot akan memberikan nilai tambah terutama dalam meningkatkan ketaatan dalam pengungkapan lingkungan perusahaan.

4.1.5 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap *Environmental Disclosure*

Dalam penelitian ini, *leverage* sebagai variabel kontrol yang diprosikan dengan rasio kewajiban terhadap modal sendiri atau ekuitas. Pada uji parsial (*t-test*), dapat dibuktikan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure* dengan hasil $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0.386 < 2.007$) dengan tingkat signifikan sebesar 0.701 lebih besar pada $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti tidak berhasil mendukung teori agensi. Berdasarkan teori agensi, manajemen perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya, hal ini dilakukan agar tidak menjadi sorotan dari para *debtholder*.

Berdasarkan hasil pengujian variabel kontrol yaitu *profitabilitas* yang diukur dengan ROA mendapatkan hasil nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0.460 < 2.007$) dengan tingkat signifikan sebesar 0.647 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5%. Dapat disimpulkan bahwa *profitabilitas* tidak dapat dibuktikan berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Kokubu *et al* (2001) dalam Darlis dkk (2009) yang menyatakan bahwa pengungkapan sosial perusahaan justru memberikan kerugian kompetitif karena perusahaan harus mengeluarkan tambahan biaya untuk mengungkapkan informasi lingkungan tersebut. Selain itu penelitian ini berhasil mendukung teori legitimasi yang menyatakan *profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi lingkungan perusahaan. Teori legitimasi adalah teori yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai *justice*, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan tersebut (Suchman, 1995 dalam Sembiring, 2005 dalam Darlis dkk, 2009).

Ukuran perusahaan (SIZE) sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini tidak dapat dibuktikan berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*. Berdasarkan hasil uji t mendapatkan hasil nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1.462 < 2.007$) pada tingkat signifikansi sebesar 0.150 berada lebih besar pada $\alpha = 5\%$, yang artinya bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Environmental Disclosure*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2006) yang menyatakan bahwa pengungkapan lingkungan perusahaan tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, dimana perusahaan besar maupun kecil, belum tentu melakukan pengungkapan lingkungan perusahaan secara luas. Hal ini dikarenakan perusahaan belum menganggap efektifitas dari pengungkapan lingkungan perusahaan, artinya pengungkapan lingkungan perusahaan belum dianggap sebagai kebijakan yang memiliki dampak positif bagi perusahaan dimasa yang akan datang.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, latar belakang pendidikan presiden komisaris tidak dapat dibuktikan berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*, sedangkan proporsi dewan komisaris independen dan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*.

5.2 Keterbatasan dan Saran Penelitian Mendatang

Topik *Environmental Disclosure* yang masih jarang diteliti, menyebabkan peneliti merasa kesulitan dalam mengumpulkan referensi dan kajian teori yang mendalam, serta kerangka kerja teori yang belum kuat mengakibatkan kesulitan dalam menentukan teori yang digunakan dalam menganalisis hasil penelitian. Selain itu, perusahaan tersebut masih belum menerapkan indeks yang sesuai dengan kriteria penelitian dan pengungkapan *Environmental Disclosure*, serta Jumlah sampel yang relatif terbatas, yaitu 32 perusahaan. Hal ini dikarenakan sedikitnya perusahaan *go public* yang masuk peringkat *Corporate Governance Perception Index* pada tahun 2008-2012. Dan Sampel penelitian tidak dibedakan berdasarkan jenis industri, jadi memungkinkan adanya bias industri.

Penelitian selanjutnya diharapkan melibatkan pihak lain (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional) dalam menentukan luas pengungkapan sebagai bahan pemeriksaan kembali. Selain itu, Penelitian selanjutnya diharapkan agar menggunakan penilaian kinerja lingkungan yang berstandar internasional, menambah periode penelitian agar semakin dapat menjelaskan kinerja lingkungan perusahaan, menambah variabel lain dalam penelitian dan menghindari

penggunaan variabel yang seragam dan dalam penelitian berikutnya diharapkan membedakan jenis industri, agar tidak terjadi bias industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Fr. R. R. 2006. "Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan". *Kumpulan Makalah Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang. 23-26 Agustus.
- Ariningtika, Endang Kiswara. 2013. "Pengaruh Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik terhadap Pengungkapan Lingkungan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011)". *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 2, No. 2, Hal. 2.
- Belkaoui, Ahmed and Philip G. Karpik. 1989. "Determinants of the Corporate Decision to Disclose Social Information". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 2, No.1, pp.36- 51.
- Cho, C. H. & Pattern, D. M., 2007. "The Role of Environmental Disclosure as Tools of Legitimacy: A Research Note". *Accounting, Organization, and Society* 32, pp. 639-647.
- Choiriyah, Umi. 2010. "Information Gap Pengungkapan Lingkungan Hidup di Indonesia". Skripsi Akuntansi *Universitas Sebelas Maret*. Diakses tanggal 09 Oktober 2014.
- Darlis, Zirman, dan Nizar Zulmi. 2009. "Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Tingkat Leverage dan Tingkat Profitabilitas terhadap Pengungkapan Informasi Lingkungan Hidup (Studi Empiris pada Laporan Keuangan Perusahaan Rawan Lingkungan Yang Listing di BEJ Periode 2004-2006)". *Jurnal Ekonomi*. Vol. 17, No. 3.
- Djoko Suhardjanto. 2010. "Pengaruh Corporate Governance, Etnis, dan Latar Belakang Pendidikan terhadap Environmental Disclosure: Studi Empiris Pada Perusahaan Listing di Bursa Efek Indonesia". *Kinerja*. Vol. 14, No. 2.
- Effendi, Lia Uzliawati, Agus Sholikhhan Yulianto. "Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Environmental Disclosure pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Tahun 2008-2011". *Kumpulan Makalah Simposium Nasional Akuntansi 15*.
- Eng, L. L. & Mak, Y. T. 2003. "Corporate Governance and Voluntary Disclosure". *Journal of Accounting and Public Policy*. Vol. 22, pp. 325-345.
- Fatayaningrum, D. 2011. "Analisis Pengaruh Manajemen Laba dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Corporate Environmental Disclosure". Skripsi tidak dipublikasikan, *Universitas Diponegoro*, Semarang.

- Ghozali, H. Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Global Reporting Initiatives (GRI). 2011. “*Environment Indicator Protocols*”. <https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3>. 1 Environment-Indicator Protocols. pdf. Diakses tanggal 09 Oktober 2014.
- Gujarati, Damodar N. Dan Dawn C. Porter. 2010. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haniffa dan Cooke. 2005. “The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting”. *Journal of Accounting and Public Policy*. pp. 391-430.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Ja'far, Muhammad., (2006), ”Pengaruh Dorongan Manajemen Lingkungan, Manajemen Lingkungan Proaktif dan Kinerja Lingkungan terhadap Public Environmental Reporting”, *Kumpulan Makalah Simposium Nasional Akuntansi IX (Padang)*.
- Kharis, Abdul. 2012. “Corporate Governance dan Ketaatan pada Badan Umum Milik Negara”. Universitas Muhamadiyah Surakarta. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol.16, Hal 37-44.
- KNKG, 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta.
- Kusumastuti, Supatmi dan Satra. 2007. “Pengaruh Board Diversity terhadap Nilai Perusahaan dalam Perspektif CG”. *Journal Ekonomi Manajemen Universitas Kristen Petra Surabaya*. <http://www.petra.ac.id/>. diakses tanggal 12 Oktober 2014.
- Kusumawardhani, Indra. 2012. “Pengaruh Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba”. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi Teknologi*. Vol. 9, No.1.
- Permatasari, Novita Dian. 2009. “Pengaruh Corporate Governance, Etnis dan Latar Belakang Pendidikan terhadap Environmental Disclosure” (Studi Empiris Pada Perusahaan Listing di Bursa Efek Indonesia). Skripsi Akuntansi *Universitas Sebelas Maret*, Surakarta. Diakses tanggal 15 Oktober 2014.
- Prior, D., J. Surroca and J.A. Tribo. 2010. “Are socially responsible managers really ethical? Exploring the relationship between earnings management and corporate social responsibility, Corporate Governance”. *An International Review*. 16(3): 443-459.

- Rohman Abdul, Tito Albi Utama. 2013. "Pengaruh Corporate Perception Index, Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Saham" *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 2, No. 2, Pp. 1-9.
- Rosenstein, S., dan Wyatt. J. G. 1990. "Outside Directors, Board Independence and Shareholder Wealth". *Journal of Financial Economic*. Vol. 26 pp.175-191.
- Said, R., Y.Hj. Zainuddin and H. Haron. 2009. "The Relationship Between Corporate Social Responsibility Disclosure and Corporate Governance Characteristics In Malaysian Public Listed Company". *Emerald Group Publishing Limited*. Vol. 5 No. 2 2009, pp. 212-226.
- Shah, Abid Ali, Rehana Kouser, Muhammad Aamir, Ch. Mazhar Hussain. 2012. "The Impact of The Corporate Governance and The Ownership Structure on The Firm's Financial Performance and its Risk Taking Behavior". *International Research Journal of Finance and Economics*. ISSN 1450-2887 Issue 93.
- Sembiring, Eddy Rismanda. 2005. "Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta". *Kumpulan Makalah Simposium Nasional Akuntansi 8*. Solo, Hal 379-395.
- Suhardjanto. 2008, "Environmental Reporting Practies: An Evidence From Indonesia". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 8 (1): 33-46.
- Suhardjanto, Djoko dan Afni, Aulia. 2009. "Praktik Corporate Social Disclosure di Indonesia (Studi Empiris di Bursa Efek Indonesia)". *Jurnal Akuntansi* . No. 03 Tahun XIII pp. 243-364 ISSN 1410 - 3591.
- Suratno, I. B., D. & Mutmainah, S., 2006. "Pengaruh Enviromental Performance terhadap Enviromental Disclosure dan Economic Performance". *Paper disajikan pada Kumpulan Makalah Simposium Nasional Akuntansi 9*. Padang, 23-24 Agustus 2006.
- Sun, N., Salama, A., Hussainey, K., and Habbash, M. 2010. "Corporate Environmental Disclosure, Corporate Governance, and Earnings management". *Managerial Auditing Journal*. Vol. 25, No. 27, pp 679-700.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Diakses tanggal 09 Oktober 2014.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diakses tanggal 09 Oktober 2014.
- Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Diakses tanggal 09 Oktober 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997. Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Uwuigbe *et al.* 2011. "The Effect of Board Size and Board Composition on Firms Corporate Environmental Disclosure: A Study of Selected Firms in Nigeria". *Acta Universitatis Danubius*. Vol. 7, No. 5, pp. 164-176.

WALHI. 2011. "Selamatkan dan Pulihkan Sungai Cijung dari Pencemaran Limbah PT. Indah Kiat Pulp and Paper". <http://www.walhi.or.id/>. diakses tanggal 09 Oktober 2014.

WALHI. 2011. "KLH Ukur Pencemaran di Peleburan Baja". <http://www.walhi.or.id/>. diakses tanggal 09 Oktober 2014.

Waryanto. 2010. "Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance (GCG) terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia". *Skripsi Akuntansi Universitas Diponegoro*. Diakses tanggal 09 Oktober 2014.

Widarjono, Agus. 2010. *Analisis Statistika Multivariat Terapan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Yesika, Anis Chariri. 2013. "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan terhadap Kinerja Lingkungan". *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 2, No. 2, Hal. 1-9.

Yusnita, Theodora. 2010. "Corporate Governance, Environmental Performance dan Environmental Disclosure di Indonesia". *Skripsi Akuntansi Universitas Sebelas Maret*. Diakses tanggal 10 Oktober 2014.

Zulaikha, Benny Setyawan. 2012. "Analisis Pengaruh Praktik Good Corporate Governance dan Manajemen Laba terhadap Corporate Environmental Disclosure". *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 01, No. 1, pp 1-13.

<http://www.mitrariset.com/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2014 pukul 14.00.

www.idx.co.id diakses pada tanggal 22 Oktober 2014 pukul 20.30.

www.csrindonesia.com diakses tanggal 05 November 2014 pukul 23.00.